

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN KONTRAK KEBUN SAWIT
(STUDI KASUS DI DESA PANGKALAN KECAMATAN PUCUK RANTAU
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI PROVINSI RIAU)

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum Pada
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*



Oleh :

Darmaliani Safitri
14130303024

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

PADANG

1439 H/2018 M

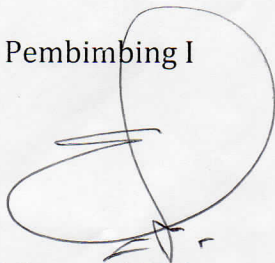
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang atas nama **DARMALIANI SAFITRI, BP.1413030324**, dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Kontrak Kebun Sawit (Studi Kasus Di Desa Pangkalan Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau)”** memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Padang, 31 Juli 2018

Pembimbing I



Eli Suryani, M.Ag
NIP.197005282000032002

Pembimbing II



Afifah Jalal, MH
NIP.196810102005012007

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Kontrak Kebun Sawit (Studi Kasus Di Desa Pangkalan Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau)”** ditulis oleh **Darmaliani Safitri, Nim.1413030324**, pada Fakultas Syari’ah Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terjadinya perjanjian kontrak antara masyarakat Desa Pangkalan Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau dengan PT. Tri Bakti Sarimas tentang penggarapan dan pengelolaan lahan perkebunan sawit. Isi perjanjian adalah lahan sawit dari masyarakat Desa Pangkalan dan pengembangan dilakukan PT. Tri Bakti Sarimas, hasil sawit dibagi sesuai kesepakatan. Pada pelaksanaannya PT. Tri Bakti Sarimas tidak melaksanakan isi perjanjian, yaitu tidak dibagikannya tanah masyarakat Desa Pangkalan sesuai dengan isi perjanjian. Oleh karena itu perlu diteliti pelaksanaan perjanjian kontrak kebun sawit antara PT. Tri Bakti Sarimas dengan masyarakat Desa Pangkalan, penyebab pihak PT. Tri Bakti Sarimas tidak melaksanakan perjanjian kontrak dan tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian kontrak kebun sawit. Jenis penelitian adalah penelitian lapangan atau *field reseach* dengan metode observasi dan wawancara. Metode analisis yang digunakan adalah *deskriptif kualitatif*, menggambarkan kejadian sesungguhnya yang terjadi di lapangan, kemudian berupaya menganalisis dari hukum Islam. Hasil penelitian, pelaksanaan perjanjian kontrak kebun sawit Desa Pangkalan Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau ditemukan data lapangan bahwa PT. Tri Bakti Sarimas tidak melaksanakan isi perjanjian, tidak membagikan tanah kepada masyarakat Desa Pangkalan padahal waktu yang disepakati dalam perjanjian sudah lewat. Adapun penyebab PT. Tri Bakti Sarimas belum melaksanakan isi perjanjian adalah sertifikat tanah masyarakat belum selesai seluruhnya dikeluarkan oleh badan pertanahan nasional. Oleh karena itu, tanah tersebut belum bisa dibagikan kepada masyarakat Desa Pangkalan. Berdasarkan tinjauan hukum Islam perjanjian kontrak yang dilaksanakan oleh PT. Tri Bakti Sarimas dengan masyarakat Desa Pangkalan tersebut adalah sah. PT. Tri Bakti Sarimas mestinya membagikan tanah masyarakat Desa Pangkalan sesuai isi perjanjian akan tetapi karena PT. Tri Bakti Sarimas tidak menepati janji maka perjanjian menjadi batal. Dalam hal ini PT. Tri Bakti Sarimas harus mengembalikan tanah kepada masyarakat Desa Pangkalan. Adapun dasar pemikirannya adalah surat al-Maidah ayat:1 yang menjelaskan tentang pentingnya menepati suatu perjanjian sesuai yang telah disepakati bersama demi memelihara dan menjaga kepercayaan satu sama lain dan pasal 1234 tentang prestasi yaitu seseorang yang menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu.

ABSTRACT

This thesis is entitled "Review of Islamic Law on Palm Oil Contract Agreements (Case Study in Pangkalan Village, Pucuk Rantau District, Kuantan Singingi Regency, Riau Province)" written by Darmaliani Safitri. Nim.1413030324, in the Shari'ah Faculty of Sharia Economics Law. This research was motivated by the occurrence of a contractual agreement between the people of Pangkalan Village, Pucuk Rantau District, Kuantan Singingi Regency, Riau Province and PT. Tri Bakti Sarimas about the cultivation and management of oil palm plantations. The contents of the agreement are oil palm land from the Pangkalan Village community and the development carried out by PT. Tri Bakti Sarimas, the results of oil palm are divided according to the agreement. In its implementation PT. Tri Bakti Sarimas did not carry out the contents of the agreement, namely the distribution of the Pangkalan Village community's land as soon as possible with the agreement. Therefore, it is necessary to examine the implementation of the palm oil contractual agreement between PT Tri Bakti Sarimas and the people of Desa Pasang, the cause of PT. Tri Bakti Sarimas does not implement contractual agreements and reviews of Islamic law on oil palm plantation contracts. This type of research is field research or field research with observation and interview methods. The analytical method used is descriptive qualitative, describing the actual events that occur in the field, then trying to analyze the Islamic law. Hasil research, the implementation of the contractual agreement on oil palm plantations in Pangkalan Village, Pucuk Rantau District, Kuantan Singingi Regency, Riau Province, found field data that PT. Tri Bakti Sarimas did not implement the contents of the agreement, did not distribute the land to the villagers of Pangkalan even though the time agreed upon in the agreement had passed. The cause of PT Tri Bakti Sarimas had not implemented the contents of the agreement was that the community land certificate had not been fully issued by the national land agency. Therefore, the land cannot be distributed to the people of Desa Pangkalan. Based on the review of Islamic law the contractual agreement carried out by PT. Tr Bakti Sarimas with the Pangkalan village community is legitimate. PT Tri Bakti Sarimas should disclose the land of the Pangkalan Village community according to the contents of the agreement but because PT Tri Bakti Sarimas does not fulfill the agreement, the agreement becomes null and void. In this case PT Tri Bakti Sarimas must return the land to the people of Desa Pangkalan. 1 which explains the importance of keeping an agreement according to what has been agreed upon in order to maintain and maintain the trust of one another and article 1234 concerning achievement, namely someone who gives up something, does something and does not do something.